

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM YANG
TIDAK MENANDATANGANI *NOTULEN/RISALAH* RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG DIBUAT DALAM PARTIJ
ACTE OLEH NOTARIS BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN
DASAR PERSEROAN**

Yohanes Fransiskus Raimond Tjung

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Pembimbing: Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Materi penelitian terkait notulen/risalah RUPS-LB yang dibuat notaris bertentangan dengan anggaran dasar perseroan, dengan permasalahan Apa bentuk perlindungan Hukum kepada pemegang saham menolak menandatangani notulen/ risalah RUPSLB bertentangan dengan anggaran dasar dan Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham terhadap kerugian yang di derita akibat keputusan RUPS. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan yaitu Anggaran Dasar perseroan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh internal perseroan. RUPS yang diselenggarakan bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar, dianggap tidak pernah diselenggarakan RUPS dalam arti batal demi hukum. Pemegang saham yang dirugikan adanya RUPS yang cacat hukum, mendapatkan perlindungan hukum, mengenai bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dapat meminta dilakukan RUPS ulang sebagai pengganti RUPS yang batal demi hukum atau meminta pemegang saham dirugikan meminta agar pemegang saham lainnya membelinya atau jika tidak ada yang tertarik membeli, dapat menjual di luar pemegang saham, atau perlindungan hukum represif dengan menggugat ke Pengadilan Negeri berupa penggantian kerugian. Upaya hukum yang dilakukan pemegang saham terhadap kerugian yang di derita akibat keputusan RUPS, mengajukan gugatan ganti rugi atas kesalahan direksi dan komisaris yang melakukan pengelolaan perseroan tidak bertitik baik untuk kepentingan perseroan sebagai telah melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (2) UUPT, jo melanggar Pasal 114 ayat (2) UUPT. Notulen/risalah RUPS tersebut dapat dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri disertai gugatan perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: Pemegang Saham, Risalah RUPS-LB, *Partij Acte* Bertentangan Dengan Anggaran Dasar

**LEGAL PROTECTION AGAINST SHAREHOLDERS WHO DO NOT SIGN
THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS MADE IN PARTIJ ACT BY A NOTARY CONTRARY TO
THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION**

Yohanes Fransiskus Raimond Tjung

Law / Magister of Notarial

Contributor: Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Research material related to the minutes/minutes of the RUPS-LB made by the notary is contrary to the company's articles of association, with the problem of what form of legal protection for shareholders refusing to sign the minutes/minutes of the RUPS-LB is contrary to the articles of association and what legal remedies can be taken by shareholders for losses suffered due to the decision of the RUPS-LB. The research uses a statutory approach and a conceptual approach, a conclusion was reached, namely the company's Articles of Association as a law and regulation that must be obeyed by the company's internal affairs. The RUPS-LB held in contravention of the Constitution and the Articles of Association is considered to have never held a RUPS-LB in the sense of null and void. Shareholders who are harmed by the existence of a legally defective RUPS-LB, get legal protection, regarding the form of legal protection in the form of preventive legal protection can request a re-RUPS-LB as a substitute for the RUPS-LB that is null and void or ask the aggrieved shareholders to request that other shareholders buy it or if no one is interested in buying, can sell outside the shareholders, or repressive legal protection by suing the District Court in the form of compensation for damages. Legal remedies taken by shareholders for losses suffered as a result of the RUPS-LB decision, filed a lawsuit for compensation for the mistakes of the directors and commissioners who carried out the management of the company not in good faith for the benefit of the company as having violated the provisions of Article 92 paragraph (2) of the UUPT, and violated Article 114 paragraph (2) of the UUPT. The minutes/minutes of the RUPS-LB can be requested for cancellation to the District Court accompanied by a lawsuit for unlawful acts.

Keywords: Shareholders, Minutes of ERUPS-LB , Partij Acte Contradicts the Articles of Association